

Ramai-Ramai Desak Tunda

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

tidak akan mengganggu pemerintahan di tingkat daerah. Sebab, masih ada beberapa alternatif agar pemerintahan tetap berjalan. "Jadi, sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan," imbuhnya.

Kendati demikian, apabila pilkada tetap dipaksakan berjalan tahun ini, JK meminta penyelenggara pemilu menyiapkan regulasi ketat terkait sistem kampanye. Sebab, pada banyak tahapan pilkada yang berpotensi memperluas penularan Covid-19.

"Kalau terjadi pelanggaran, syarat-syarat katakana lah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200 (orang), kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya," pungkas JK.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta Pemerintah, KPU dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Penundaan itu hingga tahap darurat kesehatan sudah terlewati.

"Pelaksanaan Pilkada,

meski dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangannya, Minggu (20/9)

Menurut Said, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, namun faktanya telah terbukti, dalam pendaftaran paslon saja sudah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang kian memprihatinkan.

"Idealnya tuh ditunda yah karena secara data epidemiologis kita tidak dalam posisi aman dalam melakukan Pilkada dalam prevalensi yang tinggi seperti saat ini di mana tes positivity rate

Indonesia selalu di atas 15 persen yang artinya tiga kali lipat lebih dari yang disarankan WHO," kata Dicky.

Menurut Dicky, kondisi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti Sri Lanka, Korea Selatan yang juga melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Kedua negara tersebut tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan seperti Indonesia.

"Mereka itu kondisinya terkendali di mana tes positivity rate-nya di bawah 5 persen, layanan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia, jadi saran saya ditunda," bebernya.

Di lain tempat, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi juga meminta agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditunda. "Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena covid, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon-calon kepala daerah juga banyak yang kena, bagaimana Pilkada terus dilaksanakan. Saya mengajak rakyat Indonesia khususnya di 105 juta yang berada di daerah yang akan mengalami pelaksanaan Pilkada untuk kita sama-

sama bijak meminta Pilkada 2020 ini agar ditunda di 2021," kata Fachrul.

Di tengah desakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena pandemi Corona (COVID-19), Mendagri Tito Karnavian memiliki dua opsi terkait tahapan Pilkada 2020. Dua opsi itu adalah penerbitan Perppu atau revisi PKPU tentang Pilkada.

Hal itu diungkapkan Tito dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI 'Strategi Menurunkan COVID-19, Meningkatkan Ekonomi' di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9). Tito mengatakan saat ini pemerintah sedang memikirkan dua opsi di tengah desakan penundaan Pilkada yaitu antara membuat Perppu yang isinya mengatur penanganan hingga penindakan hukum pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada atau merevisi PKPU tentang Pilkada.

"Opsi Perppu ada 2 macam, Perppu yang pertama opsi satunya adalah Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah COVID mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum," ujar Tito. (bbs/mhs)